

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Penelitian berjudul. “Pengaruh Kualitas Institusi Politik Terhadap Pendapatan Perkapita di 6 Negara ASEAN“menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Indeks Demokrasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita. Artinya, semakin meningkatnya nilai Indeks Demokrasi, pendapatan perkapita di suatu negara akan cenderung meningkat pula. Dengan membaiknya kualitas demokrasi di suatu negara, maka dalam desain insitusi politik terdapat distribusi kekuasaan yang adil dan partisipatif, *correction of error* atas pengelolaan kekuasaan oleh pemerintah sehingga intervensi pemerintah di pasar sesuai dengan *public interest* dan tidak merusak alokasi sumber daya di pasar. Dengan begitu, mekanisme pasar dapat berjalan secara adil sehingga mendorong interaksi individu ekonomi semakin baik dan berimplikasi kepada meningkatnya pendapatan perkapita di suatu negara.
2. Indeks Persepsi Kourpsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendaptan perkapita. Artinya, semakin meningkat nilai Indeks Persepsi Kourpsi, pendapatan perkapita di suatu negara akan cenderung meningkat pula. Dengan membaiknya pengendalian korupsi di suatu negara, maka kepercayaan terhadap investor akan meningkat yang mana berimplikasi kepada produktivitas ekonomi yang tinggi. Selain itu, Indeks Persepsi Korupsi yang meningkat mengindikasikan penggunaan kekuasaan oleh pejabat publik yang tidak bias atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dengan begitu, penggunaan kekuasaan baik itu melalui kerangka hukum atau implementasi kebijakan di pasar tidak merugikan individu ekonomi yang berinteraksi. Hal tersebut dapat mendorong interaksi individu di pasar yang berimplikasi kepada meningkatnya pendapatan perkapita di suatu negara.

3. Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita. Artinya, apabila nilai Indeks Pembangunan Manusia meningkat, maka pendapatan perkapita di suatu negara cenderung meningkat pula. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia mengindikasikan adanya perbaikan pada desain institusi politik dalam menyediakan akses terhadap barang publik kepada seluruh masyarakat secara adil. Dengan begitu, masyarakat memiliki kapasitas untuk berinteraksi di pasar secara produktif. Hal tersebut berimplikasi kepada meningkatnya pendapatan perkapita di suatu negara.

## V.2 Saran

Berdasarkan temuan pada penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dirumuskan sebagai berikut:

### V.2.1 Saran Teoritis

1. Berdasarkan keterbatasan penelitian sebelumnya, apabila ada peneliti yang ingin melanjutkan topik penelitian ini, dinamika institusi politik dan ekonomi secara komprehensif dapat lebih terlihat apabila variabel yang menjadi proksi institusional ditambah, seperti kerangka hukum, penegakkan hukum, implementasi kebijakan, stabilitas politik, dan indeks oligarki.
2. Selain itu, peneliti bisa menambahkan berbagai fenomena politik di negara-negara objek penelitian sebagai variabel *dummy*, misalnya pada tahun tertentu ada atau tidaknya fenomena politik di suatu negara dapat dimasukkan dalam bentuk biner (0 dan 1). Sebagai contoh, demonstrasi terhadap kebijakan publik atau produk hukum tertentu, peralihan sistem kepemimpinan, hingga kasus korupsi oleh pejabat publik pada tingkat tertentu.
3. Dalam rentang waktu, peneliti dapat menambahkannya menjadi lebih panjang ke belakang, mengingat pada periode waktu lampau, terdapat berbagai fenomena ekonomi yang berkaitan dengan dinamika politik, seperti krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia tahun 1998.

### V.2.2 Saran Praktis

1. Mengingat pentingnya demokrasi dalam mendorong pendapatan perkapita di suatu negara, maka lembaga pers perlu menjaga independensinya dan memasang mata kepada pemerintah agar penggunaan kekuasaannya sejalan dengan *public interest* dan tidak bias akan kepentingan tertentu.
2. Bagi pemerintah, mengingat signifikannya pengendalian korupsi terhadap pendapatan perkapita di suatu negara. Maka, pemerintah perlu memperkuat lembaga pengendalian korupsi. Bukan hanya operasi tangkap tangan saja, tetapi penguatan secara fundamental sebagai langkah preventif penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Selain itu, mengingat pentingnya pembangunan sumber daya manusia untuk mendorong kinerja ekonomi, maka pemerintah perlu mengalokasikan anggarannya secara efektif kepada pos-pos yang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.
3. Bagi lembaga penelitian, diharapkan dapat lebih banyak merancang penelitian lintas disiplin ilmu, seperti politik dan ekonomi mengingat dinamika politik pada penelitian ini signifikan dalam mempengaruhi perekonomian di suatu negara. Kemudian, untuk peneliti yang secara khusus ingin mengembangkan kembali penelitian ini, peneliti dapat menggunakan proksi politik yang lebih terdiversifikasi, seperti kerangka hukum, stabilitas politik, dan lain-lain.